

Yth.

Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 /SEOJK.05/2020  
TENTANG  
RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
2. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.

3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek Infrastruktur berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek Infrastruktur berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum koperasi.
7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum koperasi.
8. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
9. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

## II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
  - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
  - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
    - 1) rencana kegiatan usaha;
    - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
    - 3) rencana permodalan;
    - 4) rencana pendanaan;
    - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan
    - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi;
  - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
  - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
  - g. informasi lainnya.
2. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS, cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus meliputi juga rencana bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.
3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar Rencana Bisnis dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
  - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
  - b. indikator keuangan utama; dan
  - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.

4. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
  - a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya;
  - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi periode sebelumnya;
  - c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut; dan
  - d. tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka memperbaiki pencapaian di masa yang mendatang.
6. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 5 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
  - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam jangka panjang;
  - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan;
  - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit meliputi:
    - 1) analisis posisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;

- 2) arah kebijakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, berupa penjelasan mengenai informasi umum kebijakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha di waktu yang akan datang; dan
  - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi mengenai:
    - a) langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah ditetapkan;
    - b) penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi; dan
    - c) strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.
8. Dalam menyusun analisis posisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c angka 1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menggunakan metode analisis perencanaan strategis yang relevan.
9. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha yang paling sedikit meliputi:
- a. rencana pembiayaan Infrastruktur secara umum;
  - b. rencana pembiayaan Infrastruktur berdasarkan jenis Infrastruktur;
  - c. rencana pembiayaan Infrastruktur berdasarkan sektor ekonomi;
  - d. rencana pembiayaan Infrastruktur berdasarkan lokasi pembiayaan; dan
  - e. rencana pemberian jasa konsultasi.

11. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi rencana pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain selain yang diatur dalam angka 10 huruf a sampai dengan huruf e.
13. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 12 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
14. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
  - a. proyeksi permodalan; dan
  - b. rencana perubahan modal.
15. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 14 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
16. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi rencana perolehan pendanaan dari:
  - a. rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan;
  - b. rencana pendanaan berdasarkan mata uang; dan
  - c. rencana pendanaan berdasarkan akad pendanaan bagi UUS.
17. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 16 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
18. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:

- a. rencana pembukaan kantor cabang dan kantor cabang UUS;
  - b. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang UUS; dan
  - c. rencana penutupan kantor cabang dan kantor cabang UUS.
19. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 18 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
20. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
- a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
    - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
    - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
    - 3) rencana pembentukan komite;
  - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
    - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia;
      - a) rencana rekrutmen;
      - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
      - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
      - d) rencana penggunaan tenaga kontrak;
    - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
      - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
      - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
    - 3) rencana penggunaan tenaga kerja asing;
  - c. rencana pengembangan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:

- 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
  - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
  - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
  - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
21. Rencana pengembangan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
22. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
    - 1) asumsi makro antara lain pertumbuhan produk domestik bruto, nilai tukar, dan tingkat inflasi; dan
    - 2) asumsi mikro antara lain pertumbuhan pinjaman/pembiayaan, pertumbuhan pendanaan, tingkat bunga/imbalance hasil pendanaan, tingkat bunga/imbalance hasil pinjaman/pembiayaan, dan rasio piutang pinjaman/pembiayaan bermasalah; dan
  - b. informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, meliputi:
    - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
    - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif;
    - 3) proyeksi laporan arus kas; dan
    - 4) proyeksi rekening administratif.
23. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 22 disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas

- Jasa Keuangan ini.
24. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  25. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi:
    - a. rencana penyertaan langsung;
    - b. rencana aksi keuangan berkelanjutan; dan
    - c. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
  26. Rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf a disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  27. Rencana Bisnis yang memuat:
    - a. indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b;
    - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10;
    - c. proyeksi permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a;
    - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 16;
    - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 22;
    - f. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 24; dan
    - g. rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 26,disajikan:
    - 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
    - 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;

- 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
  - 4) dalam mata uang rupiah penuh.
28. Rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf b disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
29. Rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf c disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
30. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
  - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
  - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
  - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
  - e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
  - f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6);
  - g. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf c; dan
  - h. rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 25,
- memuat juga uraian mengenai:

- 1) alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
  - 2) strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk merealisasikan rencana dimaksud.
31. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

### III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
  - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis, termasuk mengenai fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
  - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
  - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
  - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi.

4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai:
  - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
  - b. faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
6. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama

- dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
    - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
    - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
  4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
  6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
  7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:
    - a. untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:  
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta 12710;

- b. untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS:
- 1) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta 12710; dan
  - 2) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan IKNB Syariah  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta 12710.
8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 /SEOJK.05/2020

TENTANG

RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

DAFTAR ISI

FORMAT RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Format 1	: Ringkasan Eksekutif	3
Format 2	: Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya	6
Format 3	Visi, Misi, dan Strategi Bisnis	7
Format 4	: Rencana Kegiatan Usaha	8
Format 5	: Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha	20
Format 6	: Rencana Permodalan	22
Format 7	: Rencana Pendanaan	24
Format 8	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi	31
Format 9	: Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi	33
Format 10	: Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan	39
Format 11	: Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu	60
Format 12	: Rencana Penyertaan Langsung	62
Format 13	: Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	63
Format 14	: Laporan Realisasi Rencana Bisnis	64
Format 15	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	66

**Format 1 : Ringkasan Eksekutif**

1. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dan seterusnya...
2. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dan seterusnya...
3. Indikator Keuangan Utama
  - a. Format Indikator Keuangan Utama bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

No.	Indikator Keuangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Total Aset				
2.	Pinjaman yang diberikan				
	a. pinjaman langsung				
	b. <i>refinancing</i>				
	c. pinjaman subordinasi				
	d. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
	e. lain-lain				
3.	Pinjaman yang diterima				
4.	Penerbitan Surat Berharga				
5.	Ekuitas				
6.	Saldo Laba (Rugi)				
7.	Labanya (Rugi) periode berjalan				
8.	Rasio NPF Bruto				
9.	Rasio NPF Neto				
10.	<i>Return on Asset<sup>1)</sup></i>				
11.	<i>Return on Equity<sup>2)</sup></i>				

No.	Indikator Keuangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
12.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional				
13.	<i>Net Interest Margin</i> <sup>3)</sup>				
14.	<i>Current Ratio</i> <sup>4)</sup>				
15.	<i>Cash Ratio</i> <sup>5)</sup>				

Keterangan:

x-1: tahun penyusunan laporan

x: tahun posisi Rencana Bisnis

1) *Return on Asset* = laba atau rugi sebelum pajak/rata-rata total aset

2) *Return on Equity* = laba bersih setelah pajak/rata-rata total ekuitas

3) *Net Interest Margin* = pendapatan bunga bersih/rata-rata piutang pembiayaan

4) *Current Ratio* = aset lancar/liabilitas lancar

5) *Cash Ratio* = kas dan setara kas/liabilitas lancar

b. Format Indikator Keuangan Utama bagi UUS dari Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur

No.	Indikator Keuangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Total Aset				
2.	Pembiayaan yang diberikan				
	a. pembiayaan langsung				
	b. <i>refinancing</i>				
	c. pembiayaan subordinasi				
	d. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
	e. lain-lain				
3.	Pendanaan yang diterima				
4.	Penerbitan Surat Berharga Syariah				
5.	Ekuitas				
6.	Saldo Laba (Rugi)				
7.	Laba (Rugi) periode berjalan				
8.	Rasio NPF Bruto				

No.	Indikator Keuangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
9.	Rasio NPF Neto				
10.	<i>Return on Asset<sup>1)</sup></i>				
11.	<i>Return on Equity<sup>2)</sup></i>				
12.	Beban Operasional terhadap Pendapat Operasional				
13.	<i>Net Interest Margin<sup>3)</sup></i>				
14.	<i>Current Ratio<sup>4)</sup></i>				
15.	<i>Cash Ratio<sup>5)</sup></i>				
TOTAL EKUITAS					
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS					

Keterangan:

x-1: tahun penyusunan laporan

x: tahun posisi Rencana Bisnis

1) *Return on Asset* = laba atau rugi sebelum pajak/rata-rata total aset

2) *Return on Equity* = laba bersih setelah pajak/rata-rata total ekuitas

3) *Net Interest Margin* = pendapatan pembiayaan bersih/rata-rata aset produktif

4) *Current Ratio* = aset lancar/ liabilitas lancar

5) *Cash Ratio* = kas dan setara kas/liabilitas lancar

c. Uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

(diisi dengan uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beserta proyeksi yang tercermin dari indikator keuangan utama)

4. Uraian Mengenai Target Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun

(diisi dengan uraian antara lain mengenai penurunan nilai *outstanding* pinjaman, peningkatan pemberian pembiayaan baru, peningkatan efisiensi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, penguatan permodalan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan laba Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

**Format 2 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode  
Sebelumnya**

(diisi dengan penjelasan mengenai pokok-pokok realisasi rencana bisnis periode sebelumnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi periode sebelumnya, hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka memperbaiki pencapaian di masa yang mendatang)

**Format 3 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis**

1. Visi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

.....  
.....

2. Misi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

.....  
.....

3. Strategi Bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

a. analisis posisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghadapi persaingan usaha

.....  
.....

b. arah kebijakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

.....  
.....

c. strategi pengembangan bisnis

.....  
.....

**Format 4 : Rencana Kegiatan Usaha**

1. Rencana Pembiayaan Infrastruktur secara Umum

a. Tabel Rencana Pembiayaan Infrastruktur secara Umum bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Keterangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Pemberian Pinjaman Baru:				
1. Pinjaman langsung				
2. <i>Refinancing</i>				
3. Pinjaman subordinasi				
4. Lain-lain				
B. <i>Outstanding</i> Pinjaman:				
1. Pinjaman langsung				
2. <i>Refinancing</i>				
3. Pinjaman subordinasi				
4. Lain-lain				

Keterangan:

x-1 : tahun penyusunan laporan

x : tahun posisi Rencana Bisnis

b. Tabel Rencana Pembiayaan Infrastruktur secara Umum bagi UUS:

Keterangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Pemberian Pembiayaan Baru:				
1. Pembiayaan langsung				
2. <i>Refinancing</i>				
3. Pembiayaan subordinasi				
4. Lain-lain				
B. <i>Outstanding</i> Pembiayaan:				
1. Pembiayaan langsung				

Keterangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2. <i>Refinancing</i>				
3. Pembiayaan subordinasi				
4. Lain-lain				

Keterangan:

x-1 : tahun penyusunan laporan

x : tahun posisi Rencana Bisnis

c. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana Pembiayaan Infrastruktur)

d. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Pembiayaan Infrastruktur)

2. Rencana Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Jenis Infrastruktur

a. Tabel Rencana Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Jenis Infrastruktur

Jenis Infrastruktur	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api.				

Jenis Infrastruktur	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol.				
3. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku.				
4. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.				
5. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.				
6. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi.				
7. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau				

Jenis Infrastruktur	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
distribusi tenaga listrik.				
8. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.				
9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam angka 1 sampai dengan angka 8 atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat persetujuan nomor ... tanggal ... yaitu:				
1) ...				
2) ...				
3) dan seterusnya...				
Total				

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan jenis Infrastruktur)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan jenis Infrastruktur)
---

3. Rencana Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Sektor Ekonomi

a. Tabel Rencana Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan:				
Sektor Ekonomi Lapangan Usaha				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
2. Pertambangan dan Penggalian				
3. Industri Pengolahan				
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin				
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi				
6. Konstruksi				
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
8. Pengangkutan dan Pergudangan				
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
10. Informasi dan Komunikasi				

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
12. Real Estat				
13. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya				
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib				
16. Pendidikan				
17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
18. Pariwisata, Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi				
19. Aktivitas Jasa Lainnya				
20. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
21. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				
Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha				
22. Rumah Tangga				
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
B. <i>Outstanding</i> Pinjaman dan Pembiayaan:				
Sektor Ekonomi Lapangan Usaha				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
2. Pertambangan dan Penggalian				
3. Industri Pengolahan				
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin				
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi				
6. Konstruksi				
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
8. Pengangkutan dan Pergudangan				
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
10. Informasi dan Komunikasi				
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
12. Real Estat				
13. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya				

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib				
16. Pendidikan				
17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
18. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi				
19. Aktivitas Jasa Lainnya				
20. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
21. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				
Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha				
22. Rumah Tangga				
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pembiayaan infrastruktur berdasarkan sektor ekonomi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pembiayaan infrastruktur berdasarkan sektor ekonomi)

4. Rencana Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Lokasi Pembiayaan

a. Tabel Rencana Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Lokasi Pembiayaan

Lokasi Pembiayaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Pemberian Pinjaman Baru:				
1. Jawa Barat				
2. Banten				
3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta				
4. Daerah Istimewa Yogyakarta				
5. Jawa Tengah				
6. Jawa Timur				
7. Bengkulu				
8. Jambi				
9. Nanggroe Aceh Darussalam				
10. Sumatera Utara				
11. Sumatera Barat				
12. Riau				
13. Sumatera Selatan				
14. Kepulauan Bangka Belitung				
15. Kepulauan Riau				
16. Lampung				
17. Kalimantan Selatan				
18. Kalimantan Barat				
19. Kalimantan Timur				
20. Kalimantan Tengah				

Lokasi Pembiayaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
21. Kalimantan Utara				
22. Sulawesi Tengah				
23. Sulawesi Selatan				
24. Sulawesi Utara				
25. Gorontalo				
26. Sulawesi Barat				
27. Sulawesi Tenggara				
28. Nusa Tenggara Barat				
29. Bali				
30. Nusa Tenggara Timur				
31. Maluku				
32. Maluku Utara				
33. Papua				
34. Papua Barat				
35. Di Luar Indonesia				
B. <i>Outstanding</i> Pinjaman dan Pembiayaan:				
1. Jawa Barat				
2. Banten				
3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta				
4. Daerah Istimewa Yogyakarta				
5. Jawa Tengah				
6. Jawa Timur				
7. Bengkulu				
8. Jambi				
9. Nanggroe Aceh Darussalam				
10. Sumatera Utara				
11. Sumatera Barat				
12. Riau				
13. Sumatera Selatan				
14. Kepulauan Bangka Belitung				
15. Kepulauan Riau				

Lokasi Pembiayaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
16. Lampung				
17. Kalimantan Selatan				
18. Kalimantan Barat				
19. Kalimantan Timur				
20. Kalimantan Tengah				
21. Kalimantan Utara				
22. Sulawesi Tengah				
23. Sulawesi Selatan				
24. Sulawesi Utara				
25. Gorontalo				
26. Sulawesi Barat				
27. Sulawesi Tenggara				
28. Nusa Tenggara Barat				
29. Bali				
30. Nusa Tenggara Timur				
31. Maluku				
32. Maluku Utara				
33. Papua				
34. Papua Barat				
35. Di Luar Indonesia				

Keterangan: Diisi berdasarkan lokasi proyek pembiayaan atau diisi dengan informasi lokasi yang paling dominan.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pembiayaan infrastruktur berdasarkan lokasi pembiayaan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pembiayaan infrastruktur berdasarkan lokasi pembiayaan)

5. Rencana Pemberian Jasa Konsultasi

a. Tabel Rencana Pemberian Jasa Konsultasi

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha jasa konsultasi)

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan usaha jasa konsultasi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana kegiatan usaha jasa konsultasi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

**Format 5 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha**

a. Tabel Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

No	Jenis Kegiatan Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha <sup>1)</sup>	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha		Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur <sup>2)</sup>	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha <sup>2)</sup>	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha <sup>1)</sup>
				Bagi Perusahaan	Bagi Debitur			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Keterangan:

- 1) Jenis kegiatan usaha baru merupakan jenis kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak pernah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- 2) Penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha)

**Format 6 : Rencana Permodalan**

1. Tabel Proyeksi Permodalan

Keterangan	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Modal Disetor Awal				
Pemegang Saham Lama				
1. ...				
2. dan seterusnya...				
Pemegang Saham Baru				
1. ...				
2. dan seterusnya...				
Total Modal Disetor				
Laba ditahan				
Total Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

2. Rencana Perubahan Modal

a. Uraian mengenai Rencana Perubahan Modal

(diisi dengan rencana perubahan permodalan disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan permodalan dimaksud)

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan modal)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan modal)

**Format 7 : Rencana Pendanaan**

1. Rencana Pendanaan berdasarkan Sumber Pendanaan

a. Tabel Rencana Pendanaan berdasarkan Sumber Pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Penerbitan surat berharga				
2. Pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia				
3. Pinjaman dari pemerintah asing				
4. Pinjaman dari organisasi multilateral				
5. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan dalam negeri				
6. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan luar negeri				
7. Hibah				
Total Penerimaan Pinjaman Baru				
B. <i>Outstanding</i> Pendanaan:				
1. Penerbitan surat berharga				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2. Pinjaman dari pemerintah Indonesia				
3. Pinjaman dari pemerintah asing				
4. Pinjaman dari organisasi multilateral				
5. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan dalam negeri				
6. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan luar negeri				
7. Hibah				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan ( <i>outstanding</i> )				

- b. Tabel Rencana Pendanaan berdasarkan Sumber Pendanaan bagi UUS

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Penerbitan surat berharga syariah				
2. Pendanaan dari				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
pemerintah Indonesia				
3. Pendanaan dari pemerintah asing				
4. Pendanaan dari organisasi multilateral				
5. Pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan dalam negeri				
6. Pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan luar negeri				
7. Hibah				
Total Penerimaan Pendanaan Baru				
<b>B. <i>Outstanding</i></b> Pendanaan:				
1. Penerbitan surat berharga syariah				
2. Pinjaman dari pemerintah Indonesia				
3. Pinjaman dari pemerintah asing				
4. Pinjaman dari organisasi multilateral				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
5. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan dalam negeri				
6. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan luar negeri				
7. Hibah				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan ( <i>outstanding</i> ) Baru				

c. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan)

d. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan)

2. Rencana Pendanaan berdasarkan Mata Uang

a. Tabel Rencana Pendanaan berdasarkan Mata Uang

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Rupiah				
2. Dollar Amerika Serikat <sup>1)</sup>				
3. Yen Jepang <sup>1)</sup>				
4. Mata Uang Lainnya <sup>1)</sup>				
Total Penerimaan Pendanaan Baru <sup>1)</sup>				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan ( <i>Outstanding</i> ):				
1. Rupiah				
2. Dollar Amerika Serikat <sup>1)</sup>				
3. Yen Jepang <sup>1)</sup>				
4. Mata Uang Lainnya <sup>1)</sup>				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan ( <i>Outstanding</i> ) <sup>1)</sup>				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

<sup>1)</sup> dikonversikan ke dalam rupiah.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan mata uang)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk realisasi rencana pendanaan berdasarkan mata uang dan strategi lindung nilai yang dilakukan terkait risiko nilai tukar dan suku bunganya)

3. Rencana Pendanaan Berdasarkan Akad

a. Tabel Rencana Pendanaan berdasarkan Akad bagi UUS dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Akad....				
2. Akad....				
3. Akad....				
4. Akad....				
Total Penerimaan Pendanaan Baru				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan ( <i>Outstanding</i> ):				
1. Akad....				
2. Akad....				
3. Akad....				
4. Akad....				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan ( <i>Outstanding</i> )				

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan akad pendanaan bagi UUS dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk realisasi rencana pendanaan berdasarkan akad pendanaan bagi UUS dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

**Format 8 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi**

1. Tabel Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

Jenis Kantor	Waktu Pelaksanaan <sup>1)</sup>	Perkiraan Investasi/ Biaya	Lokasi <sup>2)</sup>	Keterangan <sup>3)</sup>
Pembukaan:				
1. Kantor Cabang 2. Kantor Cabang UUS				
Perubahan Alamat:				
1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang <sup>4)</sup> a. Kantor Cabang b. Kantor Cabang UUS				
Penutupan:				
1. Kantor Cabang 2. Kantor Cabang UUS				

Keterangan:

- 1) diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
- 2) untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta.  
Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
- 3) keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
- 4) perubahan alamat kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

2. Alasan dan Pertimbangan

<p>(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi)</p>
--

### 3. Strategi

(diisi dengan strategi untuk realisasi rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi)

**Format 9 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi**

1. Rencana Pengembangan Organisasi

a. Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk realisasi rencana pengembangan organisasi)

2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Uraian mengenai Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penggunaan konsultan dan/atau penasihat, dan penggunaan tenaga kontrak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk realisasi rencana pengembangan sumber daya manusia)

3. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

a. Tabel Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

No.	Materi Diklat <sup>1)</sup>	Metode Diklat <sup>2)</sup>	Perkiraan Waktu Diklat <sup>3)</sup>	Durasi Diklat <sup>4)</sup>	Tempat	Narasumber/ Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Biaya Diklat

Keterangan:

- 1) misal: manajemen risiko, *marketing*, dsb
- 2) diisi dengan *in house training* atau *out house training*
- 3) diisi dengan bulan pelaksanaan training, misal: bulan Maret 2020
- 4) diisi dengan lamanya waktu diklat misal: 3 hari

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)
--

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk realisasi rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)
--

4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

a. Tabel Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada)/ Jumlah Tenaga Kerja Asing	Negara Asal Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan	Alasan <sup>1)</sup>
1.								
2.								
3.								
...								

Keterangan:

- 1) diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk realisasi rencana penggunaan tenaga kerja asing)

5. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

a. Uraian mengenai Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

(diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Selain itu, perlu diisi informasi mengenai perkiraan biaya pengembangan teknologi informasi)

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk realisasi rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi)

**Format 10 : Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan**

1. Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

Asumsi	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Asumsi Makro <sup>1)</sup> :				
1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)				
2. Nilai Tukar				
3. Tingkat Inflasi (%)				
4. Lainnya, dirinci per jenis asumsi <sup>2)</sup>				
Asumsi Mikro:				
1. Pertumbuhan Pinjaman/ Pembiayaan (%)				
2. Pertumbuhan Pendanaan (%)				
3. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Pendanaan (%)				
4. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Pinjaman/ Pembiayaan (%)				
5. Rasio Piutang Pinjaman/ Pembiayaan Bermasalah (%)				
6. Lainnya, dirinci per jenis asumsi <sup>3)</sup>				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

1) dalam hal tidak tersedia asumsi per semester, dapat menggunakan

asumsi per tahun dan dapat disertai dengan penjelasan mengenai sumber instansi yang menjadi dasar asumsi makro yang digunakan.

- 2) asumsi makro lainnya, seperti pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor.
- 3) asumsi mikro lainnya, seperti pangsa Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terhadap industri.

## 2. Informasi Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

### a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X- 1	Proyeksi		
		Des X- 1	Juni X	Des X
A. ASET				
1. Kas				
2. Penempatan pada Bank				
3. Surat Berharga yang Dimiliki				
4. Pendapatan yang Masih Akan Diterima				
5. Pinjaman yang Diberikan				
a. Pinjaman Langsung				
b. <i>Refinancing</i>				
c. Pinjaman Subordinasi				
d. Lain-Lain				
6. Penyertaan Modal				
7. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset				
a. Penempatan pada Bank				
b. Surat Berharga yang Dimiliki				
c. Pinjaman yang Diberikan				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X- 1	Proyeksi		
		Des X- 1	Juni X	Des X
d. Lain-Lain				
8. Aset Tidak Berwujud				
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
10. Aset Tetap				
11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
12. Aset Pajak Tangguhan				
13. Aset Lain-Lain				
Total Aset				
<b>B. LIABILITAS</b>				
1. Beban yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang Pajak				
3. Pendapatan Diterima Dimuka				
4. Liabilitas Lancar Lainnya				
5. Surat berharga yang Diterbitkan				
6. Pinjaman yang Diterima				
a. Pemerintah Republik Indonesia				
b. Pemerintah Asing				
c. Lembaga Multilateral				
d. Bank/Lembaga Keuangan				
1) Dalam Negeri				
2) Luar Negeri				
7. Imbalan Paska Kerja				
8. Liabilitas Pajak Tangguhan				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X- 1	Proyeksi		
		Des X- 1	Juni X	Des X
9. Liabilitas Lain-Lain				
Total Liabilitas				
C. EKUITAS				
1. Modal				
a. Modal Disetor				
b. Agio				
c. Disagio				
2. Cadangan				
a. Cadangan Umum				
b. Cadangan Tujuan				
c. Cadangan Lainnya				
3. Hibah				
4. Saldo Laba (Rugi)				
a. Laba				
b. Rugi				
5. Laba (Rugi) Periode Berjalan				
a. Laba				
b. Rugi				
6. Pendapatan Komprehensif Lainnya				
a. Keuntungan				
b. Kerugian				
Total Ekuitas				
Total Liabilitas dan Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

<sup>1)</sup> tata cara perhitungan pos-pos laporan posisi keuangan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan UUS

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual	Proyeksi		
	Sep X-1	Des X-1	Juni X	Des X
A. ASET				
1. Kas				
2. Penempatan pada Bank				
3. Surat Berharga Syariah yang Dimiliki				
4. Pendapatan yang Masih Akan Diterima				
5. Pembiayaan yang Diberikan				
a. Pembiayaan Langsung				
b. <i>Refinancing</i>				
c. Pembiayaan Subordinasi				
d. Lain-Lain				
6. Penyertaan Modal				
7. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset				
a. Penempatan pada Bank				
b. Surat Berharga Syariah yang Dimiliki				
c. Pembiayaan yang Diberikan				
d. Lain-Lain				
8. Aset Tidak Berwujud				
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
10. Aset Tetap				
11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
12. Aset Pajak Tangguhan				
13. Aset Lain-Lain				
Total Aset				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual	Proyeksi		
	Sep X- 1	Des X- 1	Juni X	Des X
<b>B. LIABILITAS</b>				
1. Beban yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang Pajak				
3. Pendapatan Diterima Dimuka				
4. Liabilitas Lancar Lainnya				
5. Surat berharga Syariah yang Diterbitkan				
6. Pendanaan yang Diterima				
a. Pemerintah Republik Indonesia				
b. Pemerintah Asing				
c. Lembaga Multilateral				
d. Bank/Lembaga Keuangan				
1) Dalam Negeri				
2) Luar Negeri				
7. Imbalan Paska Kerja				
8. Liabilitas Pajak Tangguhan				
9. Liabilitas Lain-Lain				
Total Liabilitas				
<b>C. EKUITAS</b>				
1. Modal				
a. Modal Disetor				
b. Agio				
c. Disagio				
2. Cadangan				
a. Cadangan Umum				
b. Cadangan Tujuan				
c. Cadangan Lainnya				
3. Hibah				
4. Saldo Laba (Rugi)				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X- 1	Proyeksi		
		Des X- 1	Juni X	Des X
a. Laba				
b. Rugi				
5. Laba (Rugi) Periode Berjalan				
a. Laba				
b. Rugi				
6. Pendapatan Komprehensif Lainnya				
a. Keuntungan				
b. Kerugian				
Total Ekuitas				
Total Liabilitas dan Ekuitas				

3. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

a. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif Perusahaan Pembiayaan

Infrastruktur

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Jun i X	Des X
A. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
1. Pendapatan Operasional				
a. Pendapatan Bunga, Provisi, dan <i>Fee</i>				
1) Pinjaman Langsung				
2) <i>Refinancing</i>				
3) Pinjaman Subordinasi				
4) Lainnya				
b. Pendapatan Jasa Konsultasi				
c. Pendapatan Dividen				
d. Pendapatan Bunga Investasi				
e. Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan				
f. Penurunan Nilai wajar Kewajiban Keuangan				
g. Keuntungan Penjualan Aset Keuangan				
h. Keuntungan dari Penyertaan Modal				
i. Pendapatan Operasional lainnya				
Jumlah Pendapatan Operasional				
2. Beban Operasional				
a. Beban Bunga Pinjaman, Provisi, dan <i>Fee</i>				
1) Beban Bunga				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Jun i X	Des X
Pinjaman				
2) Beban Provisi dan <i>Fee</i>				
b. Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan				
c. Peningkatan Nilai Wajar Kewajiban Keuangan				
d. Kerugian Penjualan Aset Keuangan				
e. Kerugian dari Penyertaan Modal				
f. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan				
1) Penempatan pada Bank				
2) Surat Berharga yang Dimiliki				
3) Pinjaman yang Diberikan				
4) Lainnya				
g. Beban Gaji dan Tunjangan				
h. Beban Pengembangan Usaha				
i. Beban Depresiasi dan Amortisasi				
j. Beban Umum dan Administrasi				
k. Beban Operasional Lainnya				
Jumlah Beban Operasional				
<b>B. LABA/RUGI OPERASIONAL</b>				
1. Laba Operasional				
2. Rugi Operasional				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Jun i X	Des X
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1. Pendapatan Non Operasional				
2. Beban Non Operasional				
D. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN				
1. Laba Sebelum Pajak Penghasilan				
2. Rugi Sebelum Pajak Penghasilan				
E. PAJAK PENGHASILAN				
1. Taksiran Pajak Penghasilan -/-				
2. Pajak Tangguhan				
a. Beban Pajak Tangguhan -/-				
b. Pendapatan Pajak Tangguhan				
F. LABA/RUGI BERSIH				
1. Laba Bersih				
2. Rugi Bersih				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

<sup>1)</sup> tata cara perhitungan pos-pos laporan laba/rugi komprehensif mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

b. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif UUS

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
1. Pendapatan Operasional				
a. Pendapatan Imbal Hasil/Imbal Jasa dan Provisi				
1) Pembiayaan Langsung				
2) <i>Refinancing</i>				
3) Pembiayaan Subordinasi				
4) Lainnya				
b. Pendapatan Jasa Konsultasi				
c. Pendapatan Dividen				
d. Pendapatan Investasi				
e. Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan				
f. Penurunan Nilai wajar Kewajiban Keuangan				
g. Keuntungan Penjualan Aset Keuangan				
h. Keuntungan dari Penyertaan Modal				
i. Pendapatan Operasional lainnya				
Jumlah Pendapatan Operasional				
2. Beban Operasional				
a. Beban Imbal Hasil/Imbal Jasa, Pendanaan, dan				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Provisi				
1) Imbal Hasil/Imbal Jasa Pendanaan				
2) Beban Provisi				
b. Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan				
c. Peningkatan Nilai Wajar Kewajiban Keuangan				
d. Kerugian Penjualan Aset Keuangan				
e. Kerugian dari Penyertaan Modal				
f. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan				
1) Penempatan pada Bank				
2) Surat Berharga Syariah yang Dimiliki				
3) Pembiayaan				
4) Lainnya				
g. Beban Gaji dan Tunjangan				
h. Beban Pengembangan Usaha				
i. Beban Depresiasi dan Amortisasi				
j. Beban Umum dan Administrasi				
k. Beban Operasional Lainnya				
Jumlah Beban Operasional				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
B. LABA/RUGI OPERASIONAL				
1. Laba Operasional				
2. Rugi Operasional				
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1. Pendapatan Non Operasional				
2. Beban Non Operasional				
D. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN				
1. Laba Sebelum Pajak Penghasilan				
2. Rugi Sebelum Pajak Penghasilan				
E. PAJAK PENGHASILAN				
1. Taksiran Pajak Penghasilan -/-				
2. Pajak Tangguhan				
a. Beban Pajak Tangguhan -/-				
b. Pendapatan Pajak Tangguhan				
F. LABA/RUGI BERSIH				
1. Laba Bersih				
2. Rugi Bersih				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

1) tata cara perhitungan pos-pos laporan laba/rugi komprehensif mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

4. Proyeksi Laporan Arus Kas

a. Proyeksi Laporan Arus Kas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X- 1	Proyeksi		
		Des X-1	Jun i X	Des X
A. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi				
1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi				
a. Penerimaan Bunga Pinjaman yang Diberikan				
b. Penerimaan Pokok Pinjaman yang Diberikan				
c. Penerimaan <i>Fee</i>				
d. Penerimaan Dividen				
e. Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya				
2. Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Operasi				
a. Penyaluran Pinjaman yang Diberikan				
b. Pembayaran Biaya Usaha				
c. Pembayaran untuk Kegiatan Operasional Lain-Lain				
d. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya				
B. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi				
a. Penerimaan Bunga dari Aktivitas Investasi				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X- 1	Proyeksi		
		Des X-1	Jun i X	Des X
b. Penerimaan atas Penjualan Surat Berharga				
c. Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap				
d. Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Modal				
e. Penerimaan Lainnya dari Aktivitas Investasi				
2. Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Investasi				
a. Pembayaran untuk Perolehan Surat Berharga				
b. Pembayaran untuk Pembelian Aset Tetap				
c. Pembayaran untuk Penyertaan Modal				
d. Pembayaran Lainnya untuk Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan				
a. Penerimaan dari Setoran Modal				
b. Penerimaan atas Penerbitan Surat Berharga				
c. Penerimaan Pinjaman				
d. Penerimaan dari Hibah				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X- 1	Proyeksi		
		Des X-1	Jun i X	Des X
e. Penerimaan Lainnya dari Aktivitas Pendanaan				
2. Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Pendanaan				
a. Pembayaran Pokok Pinjaman				
b. Pembayaran Bunga Pinjaman				
c. Pembayaran Dividen				
d. Pembayaran untuk Penarikan Kembali Saham dan Surat Utang				
e. Pembayaran Lainnya untuk Aktivitas Pendanaan				
D. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas				
E. Pengaruh Perubahan Kurs				
F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode				
Konversi Rupiah ke Valas				
G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

<sup>1)</sup> tata cara perhitungan pos-pos laporan arus kas mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Proyeksi Laporan Arus Kas UUS

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi				
1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi				
a. Penerimaan Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa Pembiayaan yang Diberikan				
b. Penerimaan Pokok Pembiayaan yang Diberikan				
c. Penerimaan <i>Fee</i>				
d. Penerimaan Dividen				
e. Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya				
2. Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Operasi				
a. Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan				
b. Pembayaran Biaya Usaha				
c. Pembayaran untuk Kegiatan Operasional Lain-Lain				
d. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya				
B. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi				
a. Penerimaan Bagi Hasil dari Aktivitas Investasi				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
b. Penerimaan atas Penjualan Surat Berharga				
c. Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap				
d. Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Modal				
e. Penerimaan Lainnya dari Aktivitas Investasi				
2. Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Investasi				
a. Pembayaran untuk Perolehan Surat Berharga				
b. Pembayaran untuk Pembelian Aset Tetap				
c. Pembayaran untuk Penyertaan Modal				
d. Pembayaran Lainnya untuk Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
1. Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan				
a. Penerimaan dari Setoran Modal				
b. Penerimaan atas Penerbitan Surat Berharga Syariah				
c. Penerimaan Dana dari Kerjasama				
d. Penerimaan dari Hibah				

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
e. Penerimaan Lainnya dari Aktivitas Pendanaan				
2. Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Pendanaan				
a. Pembayaran untuk Pengembalian Dana				
b. Pembayaran Imbal Hasil Pendanaan				
c. Pembayaran Dividen				
d. Pembayaran Pendanaan Sukuk				
e. Pembayaran Pendanaan Syariah Lainnya				
D. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas				
E. Pengaruh Perubahan Kurs				
F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode				
Konversi Rupiah ke Valas				
G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

1) tata cara perhitungan pos-pos laporan arus kas mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

5. Proyeksi Rekening Administratif

a. Tabel Proyeksi Rekening Administratif Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Tagihan Komitmen				
1. Fasilitas Pinjaman yang Diterima dan Belum Ditarik				
2. Lainnya				
Jumlah Tagihan Komitmen				
B. Kewajiban Komitmen				
1. Fasilitas Pinjaman yang Diberikan dan Belum Ditarik				
2. Lainnya				
Jumlah Kewajiban Komitmen				
Jumlah Komitmen Bersih				
C. Tagihan Kontinjensi				
Jumlah Tagihan Kontinjensi				
D. Kewajiban Kontinjensi				
Jumlah Kewajiban Kontinjensi				
Jumlah Kontinjensi Bersih				
Jumlah				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

<sup>1)</sup> tata cara perhitungan pos-pos laporan rekening administratif mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Tabel Proyeksi Rekening Administratif bagi UUS

Pos-Pos <sup>1)</sup>	Aktual	Proyeksi		
	Sept X-1	Des X-1	Juni X	Des X
A. Tagihan Komitmen				
1. Fasilitas Pendanaan yang Diterima dan Belum Ditarik				
2. Lainnya				
B. Kewajiban Komitmen				
1. Fasilitas Pembiayaan yang Diberikan dan Belum Ditarik				
2. Lainnya				
Jumlah Kewajiban Komitmen				
Jumlah Komitmen Bersih				
C. Tagihan Kontinjensi				
Jumlah Tagihan Kontinjensi				
D. Kewajiban Kontinjensi				
Jumlah Kewajiban Kontinjensi				
Jumlah Kontinjensi Bersih				
<b>Jumlah</b>				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

1) tata cara perhitungan pos-pos laporan rekening administratif mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

**Format 11 : Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu**

1. Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Rasio dan Pos Tertentu <sup>1)</sup>	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. Jumlah pinjaman dibanding dengan jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi ( <i>Gearing Ratio</i> )				
2. Rasio Saldo Piutang Pembiayaan ( <i>Outstanding Principal</i> ) Neto terhadap Total Aset ( <i>Financing to Asset Ratio</i> ) (%)				
3. Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto Terhadap Total Pendanaan yang Diterima (%)				
4. NPF Bruto (%)				
5. NPF Neto (%)				
6. <i>Return on Asset</i> (%)				
7. <i>Return on Equity</i> (%)				
8. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)				
9. <i>Net Interest Margin</i> (%)				
10. <i>Current Ratio</i> (%)				
11. <i>Cash Ratio</i> (%)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

1) tata cara perhitungan rasio dan pos tertentu mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu bagi UUS

Rasio dan Pos Tertentu <sup>1)</sup>	Aktual	Proyeksi		
	Sept X-1	Des X-1	Juni X	Des X
1. Jumlah pembiayaan dibanding dengan jumlah modal sendiri dan pembiayaan subordinasi				
2. Rasio Saldo Piutang Pembiayaan ( <i>Outstanding Principal</i> ) Neto terhadap Total Aset ( <i>Financing to Asset Ratio</i> ) (%)				
3. Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto Terhadap Total Pendanaan yang Diterima (%)				
4. NPF Bruto (%)				
5. NPF Neto (%)				
6. <i>Return on Asset</i> (%)				
7. <i>Return on Equity</i> (%)				
8. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)				
9. <i>Net Interest Margin</i> (%)				
10. <i>Current Ratio</i> (%)				
11. <i>Cash Ratio</i> (%)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

<sup>1)</sup> tata cara perhitungan rasio dan pos tertentu mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

**Format 12 : Rencana Penyertaan Langsung**

1. Rincian Rencana Penyertaan Langsung

Nama Perusahaan Anak	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

**Format 13** : Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

1. Penjelasan

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, termasuk mengenai alasan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

2. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

3. Strategi

(diisi dengan strategi penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

**Format 14 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis**

- a. diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
  - 1) realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 4;
  - 2) realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 5;
  - 3) realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam format 7;
  - 4) realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam format 9; dan
  - 5) realisasi atas proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 10.
- b. Diisi penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis terkait dengan cakupan realisasi pada huruf a, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
- c. Diisi dengan upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
- d. Diisi dengan rasio keuangan dan pos tertentu meliputi penjelasan mengenai realisasi atas rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam format 11.
- e. Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
  - 1) realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam format 6;
  - 2) realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam format 8;
  - 3) realisasi atas rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam format 12; dan
  - 4) realisasi atas rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana

dimaksud dalam format 13.	
Diketahui oleh:	
Direksi:	(ttt dan nama terang)
Direksi:	(ttt dan nama terang)
dan seterusnya...	dan seterusnya...

**Format 15 : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis**

(diisi penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur)

Disetujui oleh:	
Dewan Komisaris:	(ttd dan nama terang)
Dewan Komisaris:	(ttd dan nama terang)
dan seterusnya...	dan seterusnya...

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja